

# KOMUNITAS DIALOG PARTAI POLITIK INDONESIA

**Sambutan KID pada Konperensi Pers  
Jakarta, 14 Juni 2007**

*Oleh Ignas Kleden  
Ketua KID*

*Para Anggota Komunitas Dialog Partai Politik Indonesia,  
Saudara-saudara dari pers dan para hadirin yang  
terhormat.*

Atas nama Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi (KID) saya mengucapkan terimakasih kepada anda sekalian, yang telah berbaik hati memenuhi undangan kami untuk datang pada pertemuan hari ini, yang dimaksudkan sebagai kesempatan memperkenalkan Komunitas Dialog Partai Politik Indonesia kepada masyarakat Indonesia melalui media massa Jakarta.

Perlu saya jelaskan sekedarnya sebagai latarbelakang, bahwa KID adalah sebuah perkumpulan yang didirikan oleh beberapa tokoh intelektual, profesional dan aktivis independen, pada bulan September 2004 dengan sebuah program tunggal pada awalnya, yaitu mendirikan Sekolah Demokrasi di lima provinsi Indonesia. Sekali pun lima provinsi itu ditetapkan sebagai lokasi untuk proyek percontohan ini, yaitu Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan NTT, namun Sekolah Demokrasi didirikan pada tingkat yang dianggap lebih dekat dengan masyarakat setempat, yaitu tingkat kabupaten. Dengan demikian, sekarang ini Sekolah Demokrasi KID ada di Banyuasin, Tangerang, Malang, Jeneponto, dan Lewoleba di pulau Lembata. Banyuasin dan Tangerang baru memasuki tahun pertama Sekolah Demokrasi, sedangkan Malang, Jeneponto dan Lembata sudah menghasilkan lulusan tahun pertama, dan sekarang memasuki tahun kedua.



---

**Komunitas Indonesia untuk Demokrasi**

Jl. Tirtayasa VII No. 1 • Kebayoran Baru • Jakarta, 12160  
Ph. 021 7280 1219 • Fax 021 720 1942  
[www.komunitasdemokrasi.or.id](http://www.komunitasdemokrasi.or.id)

Tujuan Sekolah Demokrasi adalah memberikan pengetahuan, nilai dan ketrampilan demokrasi kepada para peserta sekolah ini, yang direkrut dari empat kelompok masyarakat yaitu, dari kalangan politisi aktif, dari mereka yang bekerja pada lembaga-lembaga politik, kemudian dari kalangan komunitas bisnis dan dari kelompok-kelompok yang mewakili civil society.

Para lulusan Sekolah ini diharap dapat memainkan peranan strategis dalam komunitas mereka, dalam profesi dan pekerjaan apa pun yang mereka jalankan, setelah mereka menyelesaikan masa pendidikan.

Setiap Sekolah Demokrasi di masing-masing tempat dijalankan oleh sebuah Lembaga Pelaksana atau *implementing agency* yang dipilih secara publik oleh KID melalui persaingan terbuka dalam lamaran yang diajukan dan kemudian harus menghadapi pertimbangan KID sendiri berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditetapkan. Ada empat kriteria seleksi untuk menilai usulan dari para pelamar yaitu konsep, rencana implementasi, budget dan rencana monitoring dan evaluasi. Usia para peserta pendidikan ini cukup liberal yaitu antara 18 tahun hingga 40 tahun. Jumlah lulusan setiap tahun ditetapkan secara proporsional dengan jumlah kursi yang ada dalam DPRD setempat. Setiap sekolah diminta menghasilkan lulusan sekurang-kurangnya sebanyak 50% dari jumlah kursi yang ada dalam DPRD di kabupaten bersangkutan.

Mereka yang lulus harus mengikuti ujian tertulis (sebagai tes pengetahuan) dan harus menunjukkan pencapaian mereka dalam mengembangkan ketrampilan. Setiap peserta pendidikan diharuskan menyerahkan lima artikel tentang demokrasi yang telah mereka publikasikan dalam koran lokal selama masa pendidikan. Kalau mereka tidak pandai menulis, mereka harus menyerahkan rekaman empat sampai lima kali siaran radio atau talk show di stasiun radio dan televisi setempat. Kalau ini pun tak sanggup mereka lakukan, mereka harus menyerahkan rekaman empat atau lima kali dengar- pendapat atau *public hearing* dengan bupati dan DPRD setempat yang telah mereka selenggarakan. Dengan ini dikembangkan tiga ketrampilan

utama dalam mengembangkan demokrasi yaitu kemampuan menulis, berbicara, dan kemampuan organisasi.

Pembentukan Sekolah Demokrasi didasarkan pada pemikiran bahwa kekuatan demokrasi patut dibentuk dari bawah sekali, karena rakyat Indonesia di daerah-daerah relatif masih lebih terbebas dari berbagai konflik, dekadensi dan kesulitan politik yang dialami pada tingkat nasional, dan karena itu juga lebih siap menerima suatu pelatihan dalam pendidikan.

Selama masa pendidikan ini mereka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik secara langsung atas nama Sekolah Demokrasi, tetapi hanya atas nama pribadi perorangan. Setelah lulus dari sekolah ini mereka diwajibkan membentuk Komite Komunitas yang akan menjadi wadah tempat mereka dapat berkiprah secara politik atas nama sebuah institusi yaitu institusi Komite Komunitas.

Dalam pada itu KID menyadari bahwa pada tingkat nasional harus juga dilakukan sesuatu untuk mendorong proses demokratisasi. Jalan yang ditempuh sekarang ialah mengadakan dialog dengan partai-partai politik yang ada, untuk mendapat masukan mengenai pandangan yang hidup dalam masing-masing partai tentang demokrasi dan implementasinya, dan juga untuk menetapkan pengetahuan serta ketrampilan apa yang harus dikembangkan untuk memperkuat masing-masing partai dalam usaha mereka mewujudkan demokrasi, baik berupa *internal democracy* dalam masing-masing partai, mau pun demokrasi dalam seluruh pemerintahan dan kehidupan bernegara.

KID menyadari bahwa format dan isi dialog ini sebaiknya berasal dari kalangan partai politik sendiri. Untuk tujuan tersebut KID telah memfasilitasi kunjungan wakil-wakil dari tujuh partai politik Indonesia ke Den Haag untuk suatu pertemuan dan pertukaran pendapat dengan partai politik Belanda yang berlangsung pada 25 April hingga 27 April 2007. Kunjungan ini dimungkinkan berkat undangan dari mitra KID di negeri Belanda, yaitu sebuah yayasan politik yang didirikan oleh tujuh partai politik Belanda (empat partai oposisi dan tiga partai pemerintah) untuk memajukan

demokrasi multi-partai di berbagai negara. Yayasan ini dikenal dengan nama *The Netherlands Institute for Multiparty Democracy* atau disingkat IMD, yang berkedudukan di kota Den Haag dan sekarang bekerja di 15 negara di dunia.

Hari ini akan datang ke Jakarta pimpinan teras IMD, yaitu Direktur Eksekutif IMD, Roel von Meijenfeldt, dan Presiden IMD Board, Dr. Ben Bot, yang adalah Menteri Luar Negeri Belanda dalam kabinet yang lalu. Patut dicatat bahwa Dr. Ben Bot adalah Menlu pertama dari negeri Belanda yang mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu pemerintah Belanda dan masyarakat Belanda masih tetap mempertahankan anggapan bahwa Indonesia baru merdeka pada tahun 1949 saat penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda ke Indonesia.

Pada hari-hari mendatang pimpinan IMD bersama KID akan mengunjungi pimpinan dari tujuh partai politik Indonesia yang telah menjadi anggota delegasi ke Den Haag, antara lain untuk menyampaikan terimakasih atas dukungan masing-masing partai terhadap delegasi ke Belanda, dan sekaligus juga membahas kemungkinan dan waktu yang baik bagi kunjungan balasan partai-partai politik Belanda ke Indonesia.

Patut dicatat bahwa kunjungan delegasi tujuh partai Indonesia ke negeri Belanda pada bulan April yang lalu kami anggap sebagai sebuah terobosan penting, karena menjadi preseden untuk kerja sama antara partai-partai politik dari sebuah negara secara *en bloc* dengan partai-partai politik dari negara-negara lain. Tentu saja pada awalnya belum dapat dibanggakan hasil-hasil yang mengesankan. Namun demikian, kami menganggap penting bahwa kolaborasi antar-partai lintas-negara ini sudah terbentuk formatnya dan kini harus diberi isi dan substansi berupa agenda dan program yang sesuai.

Tema kunjungan ke Belanda adalah *comprehensive partnership*, yaitu kemitraan antar-partai politik lintas-negara. Namun demikian, disadari pula bahwa sebelum bergerak lintas-negara *comprehensive partnership* harus

dibangun terlebih dahulu secara domestik berupa kerja sama yang lebih solid dan lebih luas di antara partai-partai politik nasional. Dengan kesadaran ini, maka tujuh partai politik Indonesia telah bersepakat membentuk KOMUNITAS DIALOG PARTAI-PARTAI POLITIK INDONESIA, berupa sebuah forum untuk *sustainable dialog* di antara ketujuh partai itu mengenai masalah-masalah politik, khususnya masalah demokrasi, yang lebih luas lingkungannya dari soal pemerintahan dan perebutan kekuasaan atau persaingan pengaruh di antara satu partai dan partai lainnya.

Dalam kaitan dengan kerja sama antar-partai lintas-negara Komunitas Dialog ini diharap dapat memikirkan bagaimana memberi isi kepada format kerja sama yang telah terbentuk, sekaligus mewujudkan *comprehensive partnership* pada berbagai aras politik, yaitu baik secara nasional, secara bilateral mau pun secara multilateral.

Adalah jelas bahwa Komunitas Dialog ini dapat meretas kemungkinan baru di mana hubungan di antara partai-partai politik yang memang mengharuskan persaingan secara demokratis, dapat juga terwujud melalui dialog dan partnership secara demokratis. Kalau 10 orang dari 7 partai bertemu secara berkala di sebuah meja pertemuan dan membahas apa yang dianggap sebagai tantangan bersama, maka hal itu mungkin belum merupakan sesuatu yang spektakuler. Akan tetapi kalau di belakang mereka berdiri beberapa ribu konstituen, yang aspirasinya disuarakan dalam forum ini dan juga bisa diwujudkan dalam forum ini, maka kita mempunyai harapan bahwa partai-partai politik Indonesia sedang berusaha menemukan jalan kedua, *the second way*, di samping jalan biasa, untuk merealisasikan tugas mereka sebagai partai politik, barangkali tidak dalam arti yang biasa kita kenal, tetapi dalam arti yang bisa dikenang dalam sejarah politik Indonesia.

Semua kita tahu politik selalu bekerja dengan kemungkinan. Kita mengetahui pula bahwa kemungkinan diwujudkan sebagian besarnya melalui negosiasi, baik negosiasi antar-argumen dalam wacana mau pun negosiasi antar-kepentingan dalam pembentukan konsensus. Dalam teori, kita sekurang-kurangnya masih percaya bahwa pedoman

Jakarta, 14 Juni 2007

---

dalam setiap negosiasi adalah *political interest* di satu pihak dan *political reasoning* di pihak lainnya. Kalau politik pada saat ini kita anggap lebih dikendalikan oleh besar dan beratnya kepentingan, maka kita berharap dalam forum ini dapat dihidupkan lagi nalar politik itu sebagai sebuah pedoman bagi politik yang sehat dan dapat dipelajari oleh generasi mendatang.

Itulah sebabnya kita tidak takut berdialog, kita tidak takut bernegosiasi, dan kita tidak takut berpolitik. Untuk mengikuti sebuah ucapan yang amat terkenal dari Presiden John Kennedy dalam pidato inaugurasinya kita dapat berkata hari ini: *let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate.* Jangan sekali-kali kita bernegosiasi karena rasa takut, tetapi jangan sekali-kali pula kita mempunyai rasa takut untuk bernegosiasi.

*Jakarta, 14 Juni 2007*